

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara berkembang memiliki prinsip, cara, strategi dan kebijaksanaan dalam program pembangunannya. Pembangunan yang dilaksanakan oleh beberapa negara berkembang seperti Indonesia tentu untuk meningkatkan pertumbuhan negara baik dari aspek ekonomi, sosial, dan politik. Perkembangan pembangunan bidang pertanian di Indonesia tentu tidak luput dari arah pembangunan daerah yang meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kebutuhan masyarakat, sumber daya alam, perkembangan teknologi dan juga sumber daya manusia suatu negara tersebut.

Masalah pangan merupakan salah satu masalah nasional yang terpenting. Masalah pangan meliputi ketersediaan bahan pangan, distribusi dan konsumsi. Hal ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. (Syaifullah, 2013). Swasembada pangan menjadi sebuah target strategis nasional yang menjadi perhatian utama Kementerian Pertanian. Salah satu upaya yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk mengatasi permasalahan pangan adalah Upaya Khusus (UPSUS) swasembada padi dan kebijakan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

Program Upaya Khusus (UPSUS) swasembada pangan telah dilaksanakan sejak tahun 2015-2017. Program ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi padi, jagung, kedelai, daging sapi, tebu, cabai dan bawang merah sehingga Indonesia dapat mencapai swasembada pangan. Program UPSUS dilaksanakan serentak di beberapa provinsi di Indonesia, yaitu Jawa Tengah, Jawa

Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Usaha sektor pertanian merupakan usaha yang memiliki potensi risiko yang tinggi dikarenakan sifatnya yang berbasis sumber daya alam dengan tingkat adopsi teknologi ditingkat petani yang masih beragam. Selama ini petani sebagai ujung tombak dalam sistem produksi pangan nasional mendapatkan kondisi yang seluruh risiko harus ditanggung secara individual. Selain itu, kemampuan investasi petani juga terbatas, maka dalam jangka panjang hal ini akan menimbulkan permasalahan dan memberikan pengaruh yang nyata bagi sistem produksi pangan nasional salah satunya komoditi padi.

Risiko ketidakpastian yang cukup tinggi berkaitan dengan kerusakan usahatani dan risiko kegagalan panen sangat memungkinkan petani untuk beralih mengusahakan komoditas lain yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi namun dengan risiko yang lebih rendah. Jika hal tersebut terjadi secara berkelanjutan maka stabilitas ketahanan pangan nasional akan terganggu dan kesejahteraan masyarakat Indonesia juga akan mengalami penurunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang “Perlindungan dan Pemberdayaan Petani”, kementerian pertanian mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian sebagai bentuk advokasi terhadap petani dalam melindungi usahatani dari risiko gagal panen yang dapat merugikan petani. Asuransi Pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani sehingga keberlangsungan usahatani dapat terjamin. Melalui asuransi usahatani

padi, maka petani akan mendapat jaminan terhadap kerusakan tanaman padi baik karena kekeringan, terserang hama dan penyakit maupun akibat banjir.

Jawa tengah merupakan provinsi kedua penyumbang beras terbanyak di pulau Jawa dengan total 760.894 Ton (BPS,2018). Berdasarkan fakta dilapangan, Kebumen adalah salah satu daerah yang memiliki potensi dalam bidang pertanian yang unggul dalam penghasil beras nasional. BPBD memetakan 108 Desa yang tersebar di 15 Kecamatan rawan banjir yang mana Kecamatan Adimulyo memiliki Desa terbanyak dengan jumlah 16 Desa yang terdampak banjir.

Kabupaten Kebumen mampu menghasilkan 411.387,62 Ton pada tahun 2018 dan Kecamatan Adimulyo menjadi penghasil terbanyak diantara Kecamatan lainnya dengan jumlah produksi 32.303,71 Ton (BPS, 2017). Kecamatan Adimulyo memiliki 96 kelompok tani dengan total jumlah anggota keseluruhan 11.486 petani. Pada tahun 2017 di Kecamatan Adimulyo telah terdaftar 13 kelompok tani dengan total luas lahan 248,97 Ha. Berdasarkan data yang dilansir oleh pemerintah, Kabupaten Kebumen merupakan salah satu daerah penghasil beras terbanyak di Provinsi Jawa Tengah dan juga daerah yang memiliki potensi rawan bencana yang besar. Maka dari itu adanya kebijakan Asuransi Pertanian akan sangat berguna bagi petani padi khususnya untuk melindungi tanamannya dari bencana alam dan meminimalisir kerugian secara ekonomis.

Implementasi Asuransi Usahatani Padi (AUTP) di Indonesia mulai diberlakukan sejak tahun 2012. Program AUTP merupakan wujud keberpihakan pemerintah kepada petani dan aktivitasnya agar tahan pangan, khususnya di sektor tanaman padi selalu terjaga. Angka keikutsertaan Program AUTP per Juli 2017 sudah mencapai 358.189 hektare dari target akhir tahun sebesar satu juta hektare.

Pada tahun 2016, lahan yang berhasil dilindungi oleh Program AUTP adalah seluas 10.977 hektare dengan nilai sebesar 66 miliar rupiah.

Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang digulirkan Kementerian Pertanian ternyata disambut baik oleh para petani di Kebumen. Hal itu terbukti dari jumlah sawah yang telah didaftarkan asuransi sebanyak 4.300 hektare dari target 3.000 hektare tahun 2017. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kebumen Pudjirahaju mengatakan, banyaknya petani yang telah mendaftar karena sosialisasi yang maksimal termasuk dari Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad setiap shalat subuh berjamaah. Premi untuk AUTP yaitu Rp180.000 per ha per masa tanam dengan subsidi 80 persen atau Rp144.000.

Program Asuransi Usaha Tani Padi di Kabupaten Kebumen berjalan sejak tahun 2016 tepatnya pada musim tanam padi ke dua (periode bulan April hingga Desember). Pada tahap awal implementasi program, pemerintah Kabupaten melakukan dua kali sosialisasi yaitu tingkat Kabupaten dan Kecamatan yang mana dihadiri oleh pengurus harian setiap poktan. Dalam tahapan sosialisasi pemerintah Kabupaten Kebumen juga berafiliasi dengan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) agar dapat mendorong minat petani untuk mengikuti program Asuransi Usaha Tani Padi guna melindungi petani dari kerugian panen yang disebabkan oleh bencana alam dan OPT. Sejak tahun 2016 program Asuransi Usaha Tani Padi berjalan di Kabupaten Kebumen, sudah banyak klaim yang dilakukan oleh petani yang mendaftar program AUTP dengan risiko banjir, kekeringan, dan terkena serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). Namun risiko yang sering terjadi di Kebumen adalah banjir.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distapang) Kabupaten Kebumen, Ir Pudji Rahayu, membenarkan adanya areal tanaman yang tergenang banjir. Dari catatannya, ada 750 hektare lahan terendam banjir. Rinciannya, 157 hektare di Kecamatan Adimulyo, 553 hektare di Kecamatan Puring, dan 40 hektare di Kecamatan Bonorowo. Kendati demikian hal tersebut belum dapat dikategorikan puso. Apabila nantinya petani mengalami gagal panen, petani tidak perlu khawatir terhadap rugi karena Pemkab Kebumen akan mengganti kerugian petani.

Sejak tahun 2016 program AUTP sudah dijalankan di Kabupaten Kebumen, namun permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini antara lain program masih belum populer di kalangan petani, faktor eksternal seperti isu agama yang menolak sistem asuransi, proses klaim masih belum mampu dilaksanakan petani, SDM PT. Jasa Asuransi Indonesia belum siap untuk teknis operasional, kurangnya sinergisitas antar penyuluh pertanian lapangan, petani, pengawas hama, dan PT. Jasa Asuransi Indonesia saat melakukan tinjau lapangan serta respon petani atau kesadaran petani untuk mengikuti Program AUTP masih rendah serta pengetahuan petani terhadap prosedur program ini masih belum maksimal sehingga menyebabkan rendahnya minat petani untuk mengikuti Program AUTP.

Adanya hambatan atau kendala dalam proses pelaksanaan program AUTP di Kabupaten Kebumen, maka tingkat keberhasilan program Asuransi Usaha Tani Padi patut dipertanyakan dan dibutuhkannya evaluasi program. Maka dari itu program ini memiliki potensi untuk diteliti terkait keberhasilan implementasi program Asuransi Usaha Tani Padi di Kabupaten Kebumen dan korelasi apa saja

yang berhubungan keberhasilan program Asuransi Usaha Tani Padi di Kabupaten Kebumen.

B. Tujuan

1. Mengetahui tingkat keberhasilan klaim Asuransi Usaha Tani Padi di Kabupaten Kebumen
2. Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat keberhasilan klaim Asuransi Usaha Tani Padi di Kabupaten Kebumen

C. Manfaat Penelitian

1. Untuk pemerintah, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam evaluasi program Asuransi Usaha Tani Padi
2. Untuk petani, penelitian ini dapat memberikan informasi terhadap implementasi Asuransi Usaha Tani Padi
3. Untuk *stakeholder*, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program Asuransi Usaha Tani Padi
4. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya